

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Tanah pada suatu masyarakat agraris merupakan faktor produksi yang mempunyai arti penting baik menyangkut aspek sosiologi, ekonomi maupun aspek politik. Menurut Tjodronegoro (1998), tanah yang menjadi aset utama bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok tanam yang merupakan sumber kehidupan utamanya. Sumber daya tanah bersifat multifungsi dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, baik di bidang pertanian maupun non-pertanian. Di bidang pertanian tanah digunakan sebagai lahan untuk berusahatani sehingga dapat menghasilkan produksi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan di bidang non-pertanian tanah digunakan sebagai tempat pemukiman, perkantoran/jasa maupun tempat lainnya.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan

salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Kebijakan pemerintah menyangkut pertanian ternyata sebagian besarnya tidak berpihak pada sektor itu sendiri. Hal ini dicerminkan dengan makin maraknya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin meningkat juga mengakibatkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat padahal jumlah lahan tidak pernah berubah. Lahan pertanian menjadi korban untuk memenuhi kebutuhan lahan penduduk Indonesia.

Pembangunan daerah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan pada tahun 2001 sebagaimana diatur dalam UU No. 3/2004, dihadapkan pada paradigma baru. Paradigma lama yang sentralistik telah menempatkan daerah-daerah hanya sebagai objek dalam pembangunan, maka setelah otonomi menjadi paradigma era daerah membangun dengan kenyataan ini bisa berdampak pada peningkatan intensitas investasi.

Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Konversi lahan sawah banyak terjadi di Pulau Jawa yaitu di bagian Pantura yang merupakan lumbung padi Indonesia, khususnya di Pantura Jawa Barat (Tangerang, Bekasi, Serang, dan Karawang). Lahan pertanian yang subur tersebut dikonversi menjadi perumahan, industri, dan prasarana yang luasnya lebih besar bila dibandingkan dengan perluasan sawah baru. Hal ini menyebabkan luas sawah mengalami penyusutan yang cukup besar. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data BPN kabupaten Bantul, tahun 2010, data alih fungsi lahan pada tahun 2008 ke tahun 2009, penggunaan lahan pertanian ke non pertanian meningkat sebesar 40,65 ha, luas lahan 16.085,6390 ha ke 16.046,2198 ha.

Angka laju alih fungsi lahan di Bantul berkisar 20 hektar per tahun. Kecamatan yang paling sering terjadi penyempitan lahan sawah adalah di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Kecamatan Bantul. Dari perubahan penggunaan lahan/fungsi lahan yang dominan diperuntukkan bagi:

1. Pembangunan permukiman baru setelah gempa bumi di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul
2. Kawasan perindustrian
3. Usaha (perdagangan).

Konversi lahan untuk tujuan pemukiman dan prasarana sosial ekonomi khususnya di wilayah urban tidak dapat dihindari baik di Jawa maupun di Luar Jawa (Rusastra *et al.*, 1997). Bahkan di luar Jawa kecenderungannya meningkat. Menurut Rusastra dan Budhi (1997) di Banjarmasin banyak terjadi konversi lahan sawah di daerah urban dan semi-urban akibat perluasan pemukiman. Keadaan ini dapat memicu konversi lebih luas lagi. Karena pembangunan pemukiman tersebut akan diikuti oleh pembangunan prasarana ekonomi.

Dengan mengambil kasus Banjarmasin, hal yang sama tentu terjadi pada daerah urban dan semi-urban di perkotaan lain di luar Jawa. Bahkan dengan adanya otonomi daerah banyak daerah provinsi dan kabupaten mengalami pemekaran wilayah. Konsekuensinya membutuhkan bangunan perkantoran dan sarana serta prasarana ekonomi pendukung yang tidak sedikit menggunakan lahan sawah.

Dengan memperhatikan perubahan perkembangan alih fungsi lahan tersebut, area pertanian dari tahun ke tahun mengalami penyusutan. Hal ini dikarenakan laju pembangunan dan pengembangan wilayah yang cukup pesat. Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Dengan kondisi demikian, diduga permintaan terhadap lahan untuk penggunaan hal tersebut semakin meningkat. Akibatnya banyak lahan sawah, terutama yang berada di sekitar perkotaan, mengalami alih fungsi ke penggunaan tersebut. Di samping itu, dalam sektor pertanian itu sendiri, kurangnya

insentif pada usahatani lahan sawah diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya.

Dalam beberapa hal alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya bersifat dilematis. Pertambahan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonomi yang pesat di beberapa wilayah memerlukan jumlah lahan non pertanian yang mencukupi. Namun demikian, pertambahan jumlah penduduk juga memerlukan *supply* bahan pangan yang lebih besar, yang berarti lahan pertanian juga lebih luas, sementara total luas lahan yang ada berjumlah tetap. Sebagai akibatnya telah terjadi persaingan yang ketat dalam pemanfaatan lahan yang berakibat pada meningkatnya nilai lahan (*land rent*) maka penggunaan lahan untuk pertanian akan selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan (Nasoetion dan Winoto, 1996). Meskipun nilai intrinsik dari lahan pertanian, terutama sawah, jauh lebih tinggi dari nilai pasarnya (Pakpahan et. al. 2005, Sumaryanto dan Sudaryanto, 2005) namun nilai-nilai tersebut belum tercipta 'pasarannya' sehingga pemilik lahan/petani belum memperoleh nilai finansialnya. Di sisi internal sektor pertanian, berbagai karakteristik dari usahatani sendiri belum sepenuhnya mendukung ke arah pelaksanaan pelestarian lahan pertanian yang ada. Sempitnya rata-rata luas lahan yang diusahakan petani karena proses fragmentasi yang disebabkan system waris pecah-bagi makin memarjinalkan kegiatan usahatani. Sempitnya lahan berakibat pada tidak tercukupinya hasil kegiatan usaha pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi mencukupi mendorong penerapan teknologi baru untuk

peningkatan produktivitas. Yang terjadi kemudian bukan modernisasi (penerapan teknologi yang *up to date*) tapi penjualan lahan pertanian untuk penggunaan lainnya (alih fungsi lahan pertanian).

Konversi lahan pertanian pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian yang muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Luas lahan tidak akan pernah bertambah luas akan tetapi permintaan terhadap tanah terus meningkat untuk sektor nonpertanian. Proses konversi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah lahan untuk pertanian dan berubahnya mata pencaharian penduduk yang biasanya bertani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimanakah dampak alih fungsi lahan terhadap struktur masyarakat kampung Sorowajan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses konversi lahan yang terjadi di kampung Sorowajan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi lahan.
3. Untuk mendeskripsikan dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian terhadap struktur sosial masyarakat.

D. Kerangka Teori

Telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara agraris, dimana pertanian memegang peranan penting bagi aktivitas ekonomi rakyatnya. Selain memiliki fungsi penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan, pertanian juga memiliki fungsi pokok dalam kehidupan, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi yang utama. Itu artinya, kebutuhan akan tanah bukan hanya masyarakat petani (produsen pangan), melainkan juga kebutuhan masyarakat bukan petani (konsumen) secara keseluruhan. Mata pencaharian di bidang pertanian banyak dilakukan masyarakat pedesaan hampir di seluruh masyarakat di Indonesia. Sangat menarik jika membahas tentang bagaimana masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya.

1. Konversi Lahan

Menurut Utomo, dkk (1992), konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi lindung menjadi lahan pemukiman. Hal ini sejalan dengan penelitian di Desa Sintuwu dan Desa Berdikari dimana lahan yang dikonversi merupakan kawasan hutan lindung yang kemudian dijadikan kawasan pemukiman oleh mereka.

Menurut Kustiawan (1997), konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Secara umum kasus yang tercantum pada bagian sebelumnya menjelaskan hal yang serupa seperti pengubahan fungsi sawah menjadi kawasan pemukiman.

Khusus untuk sawah, konversi lahan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung (Pakpahan *et al.*,1993). Konversi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan yang mengkonversikan lahan sawah mereka ke penggunaan lain, misalnya untuk industri, perumahan, prasarana dan sarana atau pertanian lahan kering. Konversi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dikonversikan memiliki nilai jual/sewa (*land rent*) yang lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk sawah. Sementara itu, konversi tidak

langsung terkait dengan makin menurunnya kualitas lahan sawah atau makin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan (*income opportunity*) dari lahan tersebut akibat kegiatan tertentu, seperti terisolirnya petak-petak sawah di pinggiran perkotaan karena konversi lahan di sekitarnya. Dalam jangka waktu tertentu, lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke penggunaan nonpertanian atau digunakan untuk pertanian lahan kering.

Berdasarkan fakta empirik di lapangan, ada dua jenis proses konversi lahan sawah, yaitu konversi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Proses konversi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni, hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya. Sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah konversi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Berdasarkan faktor-faktor penggerak utama konversi lahan, pelaku, pemanfaatan dan proses konversi, maka tipologi konversi terbagi menjadi tujuh tipologi, yaitu (Sihaloho, 2004):

1. Konversi gradual-berpola sporadik, pola konversi yang diakibatkan oleh dua faktor penggerak utama yaitu lahan yang tidak/kurang produktif/bermanfaat secara ekonomi dan keterdesakan pelaku konversi.
2. Konversi sistematis berpola *enclave*, pola konversi yang mencakup wilayah dalam bentuk seamparan tanah secara serentak dalam waktu yang relatif sama.
3. Konversi adaptif demografi, pola konversi yang terjadi karena kebutuhan tempat tinggal/pemukiman akibat adanya pertumbuhan pendudukan.
4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial, pola konversi yang terjadi karena motivasi untuk berubah dari kondisi lama untuk keluar dari sektor pertanian utama.
5. Konversi tanpa beban, pola konversi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan aktivitas menjual tanah kepada pihak pemanfaat yang selanjutnya dimanfaatkan untuk peruntukan lain.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Lahan

Menurut Winoto (1995a) dalam Nasoetion dan Winoto (1996), alih fungsi lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem pertanian yang ada seperti halnya perubahan di dalam *land tenure system* dan perubahan dalam sistem ekonomi pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, faktor-faktor yang menentukan konversi lahan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan peraturan pertanahan yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, menunjukkan bahwa penggunaan lahan sawah untuk penanaman padi sangat *inferior* dibanding penggunaan untuk turisme, perumahan dan industri. Faktor ekonomi yang menentukan alih fungsi lahan sawah ke pertanian dan non pertanian adalah : (1) nilai kompetitif padi terhadap komoditas lain menurun; (2) respon petani terhadap dinamika pasar, lingkungan, dan daya saing usaha tani meningkat. Penelitian Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran (1996) di Jawa menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah ke non pertanian (63%) lebih tinggi dibandingkan ke pertanian non sawah (37%). Dari 63 persen tersebut, 33 persen untuk pemukiman, 6 persen untuk industri, 11 persen untuk prasarana dan 13 persen untuk lainnya (Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran 1996). Hasil temuan Rusastra et al (1997) di Kalimantan Selatan, alasan utama petani melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan dan harga lahan yang tinggi, skala usaha yang kurang efisien untuk diusahakan. Pada tahun yang

sama penelitian Syafa'at *et al.* (1995) di Jawa menemukan bahwa alasan utama petani melakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan, lahannya berada dalam kawasan industri, serta harga lahan. Pajak lahan yang tinggi cenderung mendorong petani untuk melakukan konversi dan rasio pendapatan non pertanian terhadap pendapatan total yang tinggi cenderung menghambat petani untuk melakukan konversi. Penelitian Jamal (2001), di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harga jual lahan yang diterima petani dalam proses alih fungsi lahan secara signifikan dipengaruhi oleh status lahan, jumlah tenaga kerja yang terserap di lahan tersebut, jarak dari saluran tersier, jarak dari jalan, dan jarak dari kawasan industri atau pemukiman.

Sihaloho (2004) menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab konversi lahan di Kelurahan Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat sebagai berikut:

1. Faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat berimplikasi kepada permintaan terhadap lahan pemukiman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun;
2. Faktor ekonomi yang identik dengan masalah kemiskinan. Masyarakat pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui hasil penjualan kegiatan pertanian yang umumnya rendah, berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mendapatkan modal dalam memulai usahanya, petani pada umumnya menjual tanah yang dimilikinya. Masyarakat pedesaan beranggapan akan mendapatkan

keuntungan yang lebih tinggi dari penjualan lahan pertanian untuk kegiatan industri dibandingkan harga jual untuk kepentingan persawahan. Di sisi lain pengerjaan lahan pertanian memerlukan biaya tinggi. Sehingga petani lebih memilih sebagian tanah pertaniannya untuk dijual untuk kegiatan non-pertanian;

3. Faktor luar, yaitu pengaruh warga dari desa-kelurahan perbatasan yang telah lebih dahulu menjual tanah mereka kepada pihak Perseroan Terbatas (PT);
4. Adanya penanaman modal pihak swasta dengan membeli lahan-lahan produktif milik warga;
5. Proses pengalihan pemilikan lahan dari warga ke beberapa PT dan ke beberapa orang yang menguasai lahan dalam luasan yang lebih dari 10 hektar; dan
6. Intervensi pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW tahun 2005, seluas 269,42 hektar lahan Kelurahan Mulyaharja akan dialokasikan untuk pemukiman/perumahan *real estate*;

3. Dampak Konversi Lahan

Sihaloho, (2004) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi pada perubahan struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi, yaitu:

1. Perubahan pola penguasaan lahan. Pola penguasaan tanah dapat diketahui dari pemilikan tanah dan bagaimana tanah tersebut diakses oleh orang lain. Perubahan yang terjadi akibat adanya konversi yaitu terjadinya perubahan jumlah penguasaan tanah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa petani

pemilik berubah menjadi penggarap dan petani penggarap berubah menjadi buruh tani. Implikasi dari perubahan ini yaitu buruh tani sulit mendapatkan lahan dan terjadinya proses marginalisasi.

2. Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang makin terbatas menyebabkan mudarnya sistem bagi hasil. Demikian juga dengan munculnya sistem tanah baru yaitu sistem sewa dan sistem jual gadai. Perubahan terjadi karena meningkatnya nilai tanah dan makin terbatasnya tanah.
3. Perubahan pola nafkah agraria. Pola nafkah dikaji berdasarkan sistem mata pencaharian masyarakat dari hasil-hasil produksi pertanian dibandingkan dengan hasil non pertanian. Keterbatasan lahan dan keterdesakan ekonomi rumah tangga menyebabkan pergeseran sumber mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non pertanian.
4. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan kemunduran kemampuan ekonomi (pendapatan yang makin menurun).

Dampak lain dari alih fungsi lahan pertanian adalah: kesempatan kerja pertanian menurun sejalan dengan menurunnya lahan pertanian yang tersedia, kesempatan kerja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi padi, dan degradasi lingkungan (Sumaryanto, Hermanto, dan Pasandaran, 1996).

4. Struktur Sosial Masyarakat

Merton (1964) dalam Widodo (2008) menyatakan bahwa ciri dasar dari suatu struktur sosial adalah status yang tidak hanya melibatkan satu peran, melainkan sejumlah peran yang saling terkait. Merton memperkenalkan konsep perangkat peran (role set). Social inequality merupakan konsep dasar yang menyusun pembagian suatu struktur sosial menjadi beberapa bagian atau lapisan yang saling berkait. Konsep ini memberikan gambaran bahwa dalam suatu struktur sosial ada ketidaksamaan posisi sosial antar individu di dalamnya. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan. Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan oleh Max Weber (Widodo, 2008).

Kelas dalam pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasaan modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar komoditas dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki ekonomi. Sedangkan status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Namun demikian status juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ras, usia dan agama (Widodo, 2008).

Dalam struktur masyarakat desa terdapat aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek ekonomi, sosial dan politik. Dari aspek ekonomi dan sosial terdapat kelompok sosial yang memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut terdapat pada akses terhadap faktor produksi utama dalam pertanian, yaitu tanah. Kelompok sosial yang terbentuk di desa adalah kelompok buruh tani dan kelompok petani bebas. Selain akses terhadap tanah terdapat pula prinsip peran yang membagi masyarakat desa menjadi dua kelompok sosial tersebut. Prinsip tersebut adalah salah satu kelompok memiliki peran sebagai “pengabdikan” sedangkan kelompok lainnya sebagai “penguasa”.

Perbedaan akses serta prinsip peran kelompok sosial yang ada di desa membawa berbagai implikasi dalam kehidupan sosial. Kedua kelompok sosial yang hidup bersama dalam satu tatanan masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Perbedaan status sosial antara dua kelompok sosial tersebut membawa dampak pada peran masing-masing kelompok dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dari aspek politik yaitu menyangkut kelembagaan desa.

Dalam masyarakat pertanian pedesaan pun ternyata tidak lepas dari perubahan struktur sosial masyarakat. Pembahasan struktur sosial masyarakat yang dikemukakan Ralph Linton ada dua konsep, yaitu status dan peran. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Menurut Linton (1967) dalam Widodo (2008), seseorang menjalankan perannya ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan

statusnya. Selain itu ia juga membedakan pembagian status Ascribed status (status yang diperoleh sejak lahir) dan Achieved status (status yang diraih selama hidup). Konsep ini menunjukkan bahwa dalam suatu struktur sosial terdapat ketidaksamaan sosial antar individu.

a. Peran dan Status Petani

Berdasarkan aspek ekonomi dan sosial struktur sosial masyarakat desa terbagi berdasarkan luas kepemilikan lahan menjadi dua golongan besar yaitu buruh tani dan pemilik tanah. Buruh tani mempunyai kedudukan sosial yang paling bawah dengan aktivitas ekonomi yang terbatas pada pengerahan tenaga buruh upahan kepada kaum pemilik tanah. Beberapa diantaranya mencoba untuk melakukan kegiatan ekonomi lainnya namun masih terbatas pada jenis perdagangan kecil. Berbeda dengan kaum tuan tanah yang mempunyai kegiatan ekonomi lebih bervariasi dan skala yang jauh lebih besar.

Perbedaan akses serta prinsip peran kelompok sosial yang ada di desa membawa berbagai implikasi dalam kehidupan sosial. Kedua kelompok sosial yang hidup bersama dalam satu tatanan masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Perbedaan status sosial antara dua kelompok sosial tersebut membawa dampak pada peran masing-masing kelompok dalam kehidupan sosial dan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Buruh Tani

Buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain atau petani penyewa tanah. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian, hanya sebagian kecil yang bekerja untuk jangka satu tahun atau lebih. Selain dari upah sebagai pekerja, buruh tani juga melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan. Ada juga diantaranya yang menanam lahan hutan dengan perjanjian tertentu.

Secara stratifikasi sosial buruh tani menempati posisi paling bawah pada lapisan masyarakat desa. Secara ekonomi mereka sangat terbatas sehingga buruh tani sering melakukan kegiatan migrasi dari desa ke desa lain. Tujuan utama mereka dalam bermigrasi adalah mencari upah paling baik. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk tuan tanah besar dengan upah harian. Selepas masa panen, buruh tani dibebaskan untuk menanam lahan pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil (maro). Sewaktu senggang ketika mereka tidak dipekerjakan sebagai buruh, mereka melakukan usaha perdagangan kecil-kecilan dengan keuntungan yang kecil.

Keberadaan buruh tani dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan tanah dijadikan sebagai dasar penentuan status sebagai buruh tani. Namun perlu ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah.

Kompensasi yang diberikan bagi buruh tani yang tinggal diatas tanah milik orang lain bukan berupa uang, namun berupa peran dirinya sebagai “abdi”. Buruh tani dibedakan menjadi dua subkelompok. Subkelompok pertama adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah pertanian atau hanya memiliki tanah pekarangan saja, untuk selanjutnya disebut buruh tani. Sedangkan subkelompok kedua adalah mereka yang memiliki tanah pertanian dengan luasan yang sempit yakni kurang dari 2,5 acre. Subkelompok ini disebut dengan petani tidak tetap (part time farmers).

2. Petani Bebas

Petani bebas dibedakan menjadi dua subkelompok yaitu petani bebas kecil dan tuan tanah besar. Dasar pembagian kelompok petani bebas ini adalah luas kepemilikan tanah. Mereka yang memiliki tanah antara 2,5 hingga 12 acre digolongkan dalam petani bebas kecil. Sedangkan mereka yang memiliki tanah lebih dari 12 acre termasuk dalam tuan tanah besar. Secara ekonomi kelompok petani bebas kecil tidak melakukan pekerjaan untuk mencari upah, sebaliknya mereka mempekerjakan buruh tani. Biasanya petani bebas kecil juga turut bekerja bersama-sama dengan buruh tani sekaligus mengawasi pekerjaan mereka. Selain mengerjakan tanah pertanian milik mereka sendiri, terkadang mereka juga mengerjakan tanah pertanian milik tuan tanah besar dengan cara bagi hasil. Jenis tanah yang mereka kerjakan adalah tanah sawah, berbeda dengan buruh tani yang mengerjakan tanah tegalan.

Akses petani bebas kecil terhadap sarana produksi sangat terbatas. Mereka membeli dengan harga tinggi dari tuan tanah besar. Tuan tanah besar sendiri mendapatkan sarana produksi dari agen yang berada di Lembang atau Bandung. Petani tidak bebas jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan bibit kentang impor, mereka mendapatkan bibit dari hasil panen kentang tuan tanah besar. Hubungan keluarga antara petani bebas kecil dan tuan tanah besar sedikit membantu dalam akses terhadap sarana produksi. Pengetahuan mereka berkembang dan cenderung berusaha meniru praktik pertanian yang diterapkan oleh tuan tanah besar, yang tentunya sesuai dengan batas kemampuan keuangan mereka. Perdagangan yang mereka lakukan selalu berbasis pada komoditas pertanian, mereka menjual sendiri hasil panen. Suatu hal yang berbeda dengan kegiatan perdagangan buruh tani yang menjual untuk memperoleh komisi atau pembayaran setelah barang yang mereka jual laku.

Kedudukan sosial antara tuan tanah besar dan petani bebas kecil hanya terdapat sedikit perbedaan. Petani bebas kecil merupakan cerminan sejumlah kecil masyarakat desa yang berhasil membebaskan diri dan meraih kekuasaan ekonomi yang lebih besar. Anggota kelompok petani bebas kecil yang terkadang memiliki hubungan saudara jauh dengan tuan tanah besar mampu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Mereka menempati posisi yang baik untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari penduduk lain. Posisi yang strategis tersebut merupakan wujud perjuangan mereka dalam mempertahankan status sosial

sehingga tidak turun ke lapisan buruh tani. Jumlah tuan tanah besar di desa jumlahnya paling kecil. Tanah pertanian yang mereka kuasai sebagian besar adalah tanah subur yang produktif. Kelompok ini terdiri dari sejumlah kecil keluarga yang terikat dengan perkawinan. Lima keluarga tuan tanah besar lainnya adalah bangsawan. Penguasaan modal yang besar serta hubungan yang harmonis dengan tengkulak menyebabkan posisi secara ekonomi tuan tanah besar sangat baik. Beberapa tuan tanah besar memiliki tanah pertanian di luar desa. Petani bebas sedikit banyak telah menggunakan teknik-teknik pertanian modern. Pandangan mereka telah terbentang luas melewati batas desa. Tuan tanah besar memiliki hubungan pribadi dengan pemerintah. Berbagai informasi tentang desa sedikit banyak terhimpun dari kalangan tuan tanah besar. Informasi yang terkadang sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Pemimpin desa biasanya dari kelompok petani bebas ini demikian pula orang-orang yang bekerja keras untuk gerakan koperasi desa.

Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, tuan tanah besar menjalankan fungsi sebagai pengelola. Mereka jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar walupun dengan modal yang besar. Beberapa tuan tanah besar berhasil merubah tegalan menjadi kebun buah-buahan yang terawat dengan baik. Setelah panen, tuan tanah besar menyerahkan pengelolaan tanah pertaniannya kepada buruh tani dengan cara maro. Tanah sawah yang mereka miliki disewakan atas dasar bagi hasil.

Tabel 1
Aspek Status dan Peran Petani

Aspek Status dan Peran	Buruh Tani		Petani Bebas	
	Buruh Sebenarnya	Tani Tetap	Petani Kecil	Tuan Tanah Besar
Kegiatan Ekonomi	Dipekerjakan oleh petani bebas dengan gaji harian	Bertanam di lahan yang dimilikinya dengan hasil yang sangat kurang	Mengerjakan tanah sendiri dan terkadang mengerjakan sawah tuan tanah besar dengan sistem bagi hasil	Menjalankan fungsi “manajer” pada tanah yang mereka miliki, tuan tanah besar tidak melakukan pekerjaan kasar
	Setelah panen, buruh tani diperbolehkan menanam lahan pertanian selama enam bulan	Dipekerjakan oleh petani bebas dengan gaji harian	Mempekerjakan buruh tani dengan cara diupah	Mempekerjakan buruh tani dengan cara diupah
	Melakukan perdagangan kecil-kecilan pada saat menganggur	Mengerjakan lahan milik petani bebas dengan sistem bagi hasil	Menyewakan tanah kepada petani tidak tetap dengan sistem bagi hasil	Menyewakan tanah kepada petani tidak tetap dengan sistem bagi hasil
	-	Melakukan perdagangan yang lebih luas dibandingkan buruh tani sebenarnya	Melakukan usaha perdagangan hasil pertanian	Usaha dagang hasil pertanian dan saprotan
Kedudukan Sosial	Menempati posisi paling bawah sehingga merasa “aman” karena tidak ada kekhawatiran jatuh dari posisinya		Menempati posisi atas sehingga timbul konsekuensi untuk menjaga kedudukan tersebut atau bahkan meraih kedudukan yang lebih tinggi	
	Orang tua lebih banyak bekerja dalam ranah produktif sehingga sedikit sekali memberikan “warisan kebudayaan” kepada anak-anak mereka.		Ibu biasanya tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak. Proses “pewarisan kebudayaan” di dalam rumah berjalan dengan baik	
	Tidak merasa “memiliki” desa sehingga partisipasi pembangunan kurang		Desa adalah sarana untuk mengamankan kedudukannya	

b. Status Sosial Ekonomi

Menurut Suhariadi (1989:39) bahwa yang dimaksud dengan status sosial ekonomi adalah: “Bahwa tingkat sosial ekonomi seseorang adalah suatu posisi atau jenjang yang dimiliki dalam hidup dan penghidupannya dalam masyarakat yang meliputi :

- Tingkat pendidikan yang dicapai
- Status pekerjaan yang dimiliki
- Tingkat pendapatan dan konsumsi
- Tingkat atau pola pemukiman dan pemilikan barang
- Sarana dan prasarana
- Mobilitas sosial

Berdasarkan pengertian yang dimukakan di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan keadaan status sosial ekonomi suatu posisi atau jenjang yang dimiliki seseorang dalam hidup bermasyarakat yang dilihat dari segi tingkat pendidikannya, tingkat pendapatannya, kondisi pemukiman, mobilitas sosial.

Sastroatmodjo (1995:15) mengatakan status sosial ekonomi dapat didefinisikan sebagai kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh perbedaan tingkat pendidikan, pendapatan, maupun pekerjaan. Secara sederhana, perbedaan status sosial bisa terjadi dan dilihat dari perbedaan besar penghasilan rata-rata seseorang setiap hari atau setiap bulannya. Status sosial

ekonomi masyarakat tersebut terbagi kedalam tiga tingkatan yaitu status sosial ekonomi tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah.

Status sosial diukur dengan variabel pekerjaan, jabatan formal (jabatan di kantor atau organisasi), jabatan non formal (jabatan di komunitas). Masyarakat kelas atas, misalnya, dalam banyak hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat bawah, bukan hanya dalam penampilan fisik mereka, seperti cara berpakaian dan sarana transportasi yang dipergunakan, atau bahkan jenis transportasinya, tetapi antar mereka biasanya juga berbeda ideologi politik, nilai yang dianut, sikap, dan perilaku sehari-harinya. Semakin rendah kedudukan seseorang di dalam pelapisan sosial, biasanya semakin sedikit pula perkumpulan dan hubungan sosialnya. Orang-orang dari lapisan rendah lebih sedikit berpartisipasi dalam jenis organisasi apa pun daripada orang-orang yang berasal dari strata atau kelas menengah dan atas.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Sosial Ekonomi

Untuk mengukur tentang status sosial ekonomi masyarakat Indonesia sebenarnya sampai saat ini dapat dikatakan belum terdapat kriteria atau batasan yang pasti. Oleh karena itu guna memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba memberikan pengertian tentang tingkat status sosial ekonomi atau posisi yang dimiliki seseorang dalam hidup dan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain :

1. Tingkat pendidikan yang dicapai

Sebelum dikemukakan tentang konsepsi pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini, berikut ini dikutipkan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan.

Menurut Malayu SP. Hasibuan (1991:76) pendidikan/mendidik adalah tuntutan kepada manusia yang belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri tugas hidupnya atau secara singkat Pendidikan adalah tuntutan kepada pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan dalam arti jasmania dan rohaniah.

Sementara itu dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah sekolah atau pendidikan yang pernah dicapai oleh para informan, dimana kita mengetahui bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu mengubah cara berpikir seseorang. Dengan demikian semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin kritis pula pola pemikirannya.

2. Status pekerjaan yang dimiliki

Tingkat pekerjaan yang dimaksud adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pendapatan/uang guna menyokong atau menghidupi keluarga dalam rangka menunjang ekonomi keluarga.

Dalam rangka penulisan ini digunakan tiga tingkatan kategori yang tinggi, sedang dan rendah. Adapun tingkat pekerjaan dapat dikategorikan tinggi apabila pekerjaan yang dimiliki berkisar sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Dikategorikan sedang apabila pekerjaan yang dimiliki adalah sebagai petani/pedagang dan masuk kategori rendah apabila pekerjaannya sekedar sambilan semata atau tidak bekerja.

3. Tingkat pendapatan yang diperoleh

Sebagaimana dengan faktor-faktor yang lain, tingkat pendapatan juga merupakan faktor yang sangat penting di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang akan berpengaruh terhadap status sosial ekonomi keluarga.

Dalam kaitannya dengan penulisan penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang diperoleh dari suami dan atau istri yang bekerja dalam sebulannya, dalam rangka untuk menunjang kehidupan rumah tangga keluarga.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali berbagi realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Lexy J. Moleong (2004:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami suatu konteks secara menyeluruh dan mendalam. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang diarahkan untuk menemukan hubungan (kausalitas) antar variabel, penelitian kualitatif diarahkan untuk mengurai suatu konteks permasalahan yaitu tentang latar suatu fenomena, proses yang membentuk fenomena tersebut serta mengenai pesepso, nilai, perilaku para subyek manusia yang terlibat dalam fenomena tersebut.

Strategi penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berarti memilih suatu kejadian atau gejala untuk diteliti dengan menerapkan berbagai metode (Stake, 1994 : 236 *dalam* Sitorus, 1998). Pemilihan strategi tersebut terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu eksplanatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan penyebab-penyebab gejala sosial serta keterkaitan sebab akibat dengan gejala sosial lainnya (Sitorus, 1998). Penelitian ini dilakukan guna menerangkan berbagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini

mengenai proses konversi lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian yang meliputi faktor penyebab dan dampaknya pada pemilikan lahan terhadap masyarakat.

Selama penelitian, peneliti menerapkan metode pengumpulan data menurut pakem penelitian kualitatif, yaitu wawancara dan pengamatan. Dalam hal wawancara, peneliti mewawancarai kepala Dukuh kampung Sorowajan, Pak Sularto, dan beberapa orang warga, yaitu Pak Sugito, Pak Bardiman, Mbah Halimah, Yudi dan Martin.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampung Sorowajan, tepatnya di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena kampung ini banyak terdapat lahan yang dijadikan kawasan perumahan yang pada awalnya merupakan lahan pertanian yang cukup luas. Namun, masih terdapat lahan yang belum terkonversi menjadi tempat perumahan. Selain itu, kawasan ini berada dekat dengan pusat kota yang mempermudah akses pengangkutan barang hasil produksi dari Sorowajan ke wilayah lain.